

# Sekali Lagi, Syiah dan Kerukunan Umat

(Tanggapan untuk Muhammad Baharun dan Fahmi Salim)

Haidar Bagir

Presiden Direktur Kelompok Mizan

Pertama, mengenai adanya pendapat di kalangan Ahlusunah yang menyatakan bahwa Alquran yang kita miliki sekarang tidak lengkap. Pandangan ini—sekali lagi saya tegaskan, sudah tentu tak mewakili sikap Ahlusunah—, juga terdapat pada kitab-kitab hadis sahid maupun kitab-kitab standar Sunni yang posisinya sama kuat dibanding kitab hadis Syiah yang menukil pandangan sejenis. Berikut ini sebagian di antaranya yang belum disebut Saudara Fahmi Salim.

Diriwayatkan dalam, antara lain, *Shahih Bukhari*, bab “Syahadah” berbunyi, “*ind al-hakim fi wilayah al-Qadha*”, dan dinukil dalam *Al-Itqan* karya Imam Suyuthi dan *Tafsir Ibnu Katsir*, bahwa Sayidina Umar bin Khattab mengatakan, “Apabila bukan karena orang-orang akan mengatakan bahwa Umar menambah ayat ke dalam Kitabullah, akan aku tulis ayat rajam dengan tanganku sendiri.” Bahkan, dalam *Al-Itqan* dan beberapa kitab lain disebutkan bahwa ayat rajam yang hilang itu berbunyi, “*Idza zana syaikhu uca syaikhatu farjumuhuma al-battann nakalan minallah, wallahu ‘azizun hakim*.” Kenyataannya, kita semua tahu bahwa ayat ini tak terdapat dalam Alquran yang kita miliki.

Selain hadis tentang ayat Alquran dalam simpanan Siti Aisyah yang hilang itu, terdapat pula riwayat dalam *Musnad Ahmad* dan dinukil dalam *Al-Itqan* karya Imam Suyuthi bahwa Siti Aisyah mengatakan, “Pada masa Nabi, surah al-Ahzab dibaca sebanyak 200 ayat, tetapi ketika Usman menulis mushaf, ia tidak bisa mendapatkannya kecuali yang ada sekarang.” Seperti kita ketahui bahwa surah al-Ahzab yang ada di mushaf sekarang ini adalah 73 ayat. Berarti menurut riwayat itu ada 127 ayat yang hilang dari surah ini.

Sejalan dengan itu, *Tafsir al-Qurthubi* menuliskan hadis dari Ubay bin Ka’b yang menyebutkan jumlah ayat dalam surah yang sama adalah 286. Rawi yang sama sebagaimana dinukil *Al-Itqan* menyebutkan bahwa jumlah surah Alquran adalah 116, bukan 114 yang kita miliki sekarang karena adanya dua surah yang hilang dan disebut-sebut bernama *Al-Hafd* dan *al-Khal*’.

Di sisi lain, bantahan para ulama Syiah dari kalangan *mutaqaddimin* dan *muta’akh-khirin* terhadap isu adanya perubahan/ketidakkengkapan Alquran ini dapat dibaca di banyak tulisan dan pandangan para ulama Syiah sendiri. Terbatasnya tempat hanya memungkinkan penulis mengungkap pandangan, Ayatullah Khomeini—antara lain dalam *Tahdzib al-Ushul*—yang mengatakan, “Semua pernyataan tentang *tahrif* ini dapat segera ditunjukkan sebagai (berdasar hadis-hadis) lemah (daif) *ayau majhul* (rawinya tak dikenal).”

Memang, meski dianggap sebagai kitab hadis paling bisa diandalkan di kalangan Syiah, tak sedikit ahli, khususnya para ulama *muta’akh-khirin* di kalangan mazhab ini sendiri—yang menunjukkan bahwa kitab *Al-Kafi*, apalagi kitab-kitab sahid lainnya, tak dengan demikian bebas dari kemungkinan memuat hadis-hadis palsu atau lemah. Sekadar menyebut contoh saja, yang termasuk dalam kalangan ini adalah Syekh Saduq sendiri, Muhammad Husayn Thabathaba’i dan Muhammad Bagir Irawani dari kelompok ulama kontemporer.

Dalam soal ini, sayang sekali Saudara Fahmi tidak teliti dalam merujuk pendapat Adnan al-Bahrani dan al-Nuri al-Thabarsi. Sebaliknya, menurut Saudara Fahmi, kedua ulama Syiah itu justru membantah tuduhan adanya *tahrif* Alquran di kalangan Syiah. Hal ini dapat dilihat jika kita merujuk langsung karya mereka yang berjudul, *Masyariq al-Syamus al-Duriyah fi Ahadiyah Madzhab al-Akhbariyah dan Fashl al-Khithab*.

Selanjutnya, yang kedua, me-

ngenai riwayat pengutukan Sayidina Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar—al-Suyuthi menyebutnya di lebih dari 70 mimbar—selama puluhan tahun. Sebelum yang lain-lain, perlu penulis tegaskan, kita semua setuju adalah salah untuk menisbahkan fenomena ini kepada Ahlusunah sebagai mazhab. Kita semua tahu bahwa kaum Sunni sama sekali tak kurang dalam hal penghormatan terhadap anggota keluarga Nabi. Pertanyaannya, apakah benar bahwa hal itu dilakukan oleh orang-orang Khawarij?

Jika melihat riwayat-riwayat yang diungkapkan di berbagai kitab tarikh yang penulis ketahui, tak ada yang menyebutnya dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Para penulis itu, selain Ibnu Atsir yang telah disebutkan oleh Saudara Fahmi, antara lain, adalah Thabari dalam *Tarikh*-nya, Ibnu Katsir juga dalam *Tarikh*-nya, Al-Suyuthi dalam *Al-Itqan*, Yaqt Hamawi (penulis *Mu’jam al-Buldan*), Ibnu ‘Abd Rabbih (penulis *Al-Aqd al-Farid*), serta belakangan Maulana Raghib Rahmani (penulis *Hazrat ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, Al-Khalifah al-Zahid*). Mereka sepenuhnya mengaitkan fenomena ini dengan permusuhan Muawiyah dan Ali.

Dalam *Shahih Muslim*, misalnya, termuat sebuah hadis tentang instruksi Gubernur Madinah yang juga salah satu kerabat Marwan bin Hakam kepada Sahl Ibnu Sa’ad untuk mengutus Sayidina Ali. Kitab-kitab tarikh menyebutkan, bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz muda sempat terbawa oleh kebiasaan itu sebelum belakangan menyepatnya.

Tampaknya tidak semudah itu menafikan catatan-catatan sejarah dengan sekadar mengutip satu dua orang penulis yang menyebut para rawinya lemah hafalannya dan tidak dikenal. Sebagai ilustrasi, Imam Abu Bakr al-Dzahabi, seorang ahli *rijal* (rawi) terkemuka di kalangan ahlusunah, justru menyebut al-Maidani—salah seorang rawinya—sangat bisa dipercaya.

Kini, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya memberikan catatan khusus ke-

pada Saudara Fahmi Salim. Saya, *saamihni yaa akhi*, mengalami kesulitan serius untuk memahami logika Antum. Bagaimana mungkin Antum menuduh saya melakukan distorsi dan melemparkan fitnah dalam argumentasi saya, padahal dengan tegas saya menyatakan bahwa adanya riwayat-riwayat tentang *tahrif* Alquran di kalangan Ahlusunah dan fenomena pengutukan Sayidina Ali sebagai sama sekali tak mewakili pandangan Ahlusunah?

Jika saya, yang sudah menegakkan hal itu, harus dibilang pembuat fitnah, atau melakukan pelecehan, maka apa yang akan Antum katakan kepada para rawi hadis dari kalangan sahabat dan tabiin, serta para ulama Ahlusunah yang jelas-jelas meriwayatkan hal itu begitu saja? Jika mengikuti logika Antum, Antum harus menyebut mereka sebagai biangnya tukang fitnah—*wal-‘iyadzu bil-Lah!*! Juga, bukankah saya sudah melakukan dalam artikel saya terdahulu adalah persis dengan apa yang dilakukan para ulama ahlusunah yang Antum rujuk: menukilnya, hanya untuk kemudian membantahnya?

Dari sini tampak jelas bahwa kita memang harus terus melancarkan *tawaashaw bil-haq wa tawaashaw bish-shabr* dalam bentuk penyelenggaraan diskusi-diskusi objektif dan penuh keikhlasan antarmazhab dan kelompok Islam, serta lewat berbagai medium—bukan dakwah (proselitasi yang didorong semangat konversi) satu mazhab terhadap mazhab lain.

Menanggapi kedua penulis, selama hampir 30 tahun dalam kiprahnya, Penerbit *Mizan* tak pernah menerbitkan satu pun buku yang diarahkan pada proses proselitasi seperti ini. Apalagi, mengandungi pelecehan terhadap keyakinan umat Islam dari kelompok mana pun. Justru, kita pun perlu menegah ekstremisme, pemutlakan pandangan, intoleransi, dan kerancuan logika yang berasal dari kelompok mana pun. Satu-satunya yang boleh kita andalkan hanyalah *qab salim* (QS 26 :89). Yakni, hati (akal) yang sehat, bersih, dan ikhlas. *Wallah a’lam*. ■

## Tajuk

# Tuntaskan Kasus Cek Pelawat

Kabar yang sudah lama ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Miranda Swaray Goeltom ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap untuk pemenangan Miranda sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004.

Peningkatan status dari penyelidikan menjadi penyidikan terhadap tersangka Miranda tersebut didasarkan pada hasil ekspose dan pendalaman terhadap kasus cek pelawat. Miranda dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto dan atau Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Pidana.

Sejauh ini kasus cek pelawat ini sudah memakan cukup banyak korban, termasuk orang-orang berpengaruh di DPR seperti Panda Nababan dan Paskah Suzeta. Mereka sudah masuk di hotel prodeo beserta puluhan mantan anggota DPR lain yang terlibat kasus yang sama. Satu lagi, istri mantan Wakilpolri Adang Darajatun, Nunun Nurbaetie, yang tinggal dua-tiga langkah lagi menyusul ke penjara.

Kasus ini sempat buntu ketika Nunun Nurbaetie yang membagikan cek tersebut kabur ke luar negeri. Setelah setahun lebih menjadi buron, akhirnya Nunun tertangkap KPK, dan segera dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan Nunun yang sudah lebih dahulu dijadikan tersangka itulah yang membuka peluang menjadikan Miranda sebagai tersangka.

Beberapa partai politik yang anggotanya masuk bui karena kasus ini berang terhadap KPK. Mereka terus menuntut siapa yang menyuap para anggota DPR itu. Jurus yang dipakai, orang yang disuap sudah masuk ke penjara, mengapa yang menyuap masih bisa bebas di luar? Kini pertanyaan itu sebagian sudah terjawab dengan status tersangka Miranda.

Apakah sudah cukup sampai Miranda? Harusnya tidak. Dicurigai ada penyandang dana yang berada di belakang Miranda yang rela memberikan dana sebesar Rp 24 miliar. Gaji sebagai DGS memang besar, tapi untuk mengembalikan modal sebesar itu butuh sekitar tiga tahun, jadi rasanya tidak mungkin Miranda membiayai sendiri.

Menyingkap penyandang dana ini tidak kalah penting dengan menersangkakan Miranda. Karena, ketika dia berani mensponsori seseorang menjadi pejabat dengan biaya cukup besar, akan ada konsekuensi yang harus ditanggung sang pejabat. Kata orang Barat ‘no free lunch’, atau tak ada makan siang gratis. Jadi, tak ada pula dana gratis buat pejabat, mereka akan diikat oleh janji-janji sebelum jadi pejabat.

Kunci tentang siapa penyandang dana tentu ada pada Miranda. Setidaknya Miranda bisa menjadi pintu masuk. Keterangan Miranda bisa jadi akan berbeda dengan yang lain, karena mereka hanya menerima cek. Penyidik KPK harus bisa menelusik sampai pada akarnya. Mungkin saja Miranda bungkam karena menyangkut perjanjian mereka. Justru di sinilah tantangan buat KPK untuk mencari tahu.

Bukan cuma penyandang dana, diharapkan dari pemeriksaan Miranda juga bisa terkuak siapa-siapa saja selain anggota DPR yang sudah masuk penjara yang juga menerima cipratan cek dari dia. Secara logika, para anggota DPR itu tidak mungkin bermain sendiri secara personal, tentu ada instruksi dari partai secara resmi. Jika ada instruksi dari partai, secara logika pula ada aliran cek ke petinggi partai.

Kita berharap, KPK bekerja lebih keras lagi untuk bisa mengungkap secara gamblang kasus cek pelawat ini. Kita berharap pula Miranda tidak mengorbankan diri sendiri dengan menutup-nutupi pihak lain yang tersangkuit dengan masalah cek haram ini. ■

## :: suarapublika ::

### Keluhan Pelanggan Tanggapan Holcim

Menanggapi surat pembaca yang dikirim oleh Bapak H Ishomudin Mughtar dan dimuat di *Harian Republika* pada 17 Januari 2012, dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah menghubungi Bapak H Ishomudin Mughtar dan hal tersebut telah diselesaikan dengan baik oleh kedua belah pihak. Semua masukan dari pelanggan akan kami manfaatkan untuk peningkatan produk dan layanan bagi seluruh pelanggan Holcim Indonesia. Terima kasih.

Novi Maryanti

Corporate Communications PT Holcim Indonesia Tbk

### Darmatama Megah Finance Mengecewakan Pelanggan

Saya mendapat pengalaman yang sangat buruk dengan perusahaan *leasing* Darmatama Megah Finance (darmatama) cabang Cirebon. BPKB mobil saya diserahkan tanpa sepengetahuan pemijman dan tanpa surat kuasa pengambilan BPKB.

Kronologinya adalah sebagai berikut. Sekitar Desember 2009 saya mengover kredit sebuah innova diesel tahun 2005 dari dokter Prima di Cirebon. Dan saya sudah melakukan pembayaran hingga cicilan ke-23. Pada Oktober 2011 setelah sisa cicilan tinggal 13 kali lagi, saya berencana menjual innova tersebut, dan berhubung dengan pembeli sudah kenal saya menyerahkan mobil dengan komitmen dalam satu minggu akan segera dilunasi dengan harga yang sudah disepakati.

Saat melakukan pengecekan ke *leasing* Darmatama di mana menurut hitungan saya dengan kekurangan 13 kali cicilan lagi tinggi 68 jutaan membengkak menjadi 118 juta. Padahal, cicilan per bulan hanya 5,3 juta. Denda yang dikenakan Darmatama sungguh mencengangkan. Saya didenda selama dua tahun berjalan sebesar Rp 50 juta atau kira kira Rp 2 juta lebih per bulan. Sebuah angka yang fantastik.

Berhubung angkanya besar dan saya harus bertugas di Jakarta saya serahkan kepada pembeli mau lanjut, dibatalkan atau mau mengurus sendiri permohonan diskon denda ke Darmatama. Akhirnya pembeli sepakat mengurus sendiri denda tersebut. Sampai Januari 2013 penurunan total pelunasan menjadi 80 juta padahal sudah masuk dua kali cicilan sebesar Rp 10 juta. Akhirnya karena masalah berlarut-larut saya memutuskan jual beli batal saja, dan saya minta si pembeli menyerahkan mobil tersebut dan hitung-hitungan.

Tiba-tiba pada Selasa, 17 Januari, si pembeli tanpa pemberitahuan terlebih dahulu melakukan pelunasan ke Darmatama dan mengambil BPKB. Saya cek kepada Dokter Prima ternyata proses pelunasan dan pengambilan BPKB tersebut juga tidak seizin dan tanpa surat kuasa dari Dr Prima (surat kuasa asli ada di saya dan tidak pernah diserahkan ke orang lain selain saya). Ini kan ilegal.

Saya benar-benar dirugikan oleh Darmatama ini, karena pembeli dengan mudah tidak menyelesaikan urusan pembayaran dengan saya. Saya bersedia agar masyarakat dan *showroom* serta pedagang mobil, agar waspada terhadap *leasing* Darmatama, jangan sampai pengalaman ini menimpa orang lain. Untuk otoritas keuangan yang membawahkan *leasing* saya yang bersedia agar *leasing* seperti ini ditinjau kembali perizinanya kalau perlu dicabut izinnya jangan sampai beroperasi dan terus-menerus merugikan masyarakat Indonesia.

Holid Azhari

Perum Griya Caraka Blok C2 No 43, Kalikoa Kedawung, Cirebon

# Islam dan Krisis Lingkungan

Imam S Arizal

Ketua Umum PC PMII Yogyakarta  
Peneliti CTSD UIN Sunan Kalijaga

Isu krisis lingkungan hidup adalah masalah yang menyita perhatian masyarakat dunia dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Masyarakat global mulai menyadari bahwa industrialisasi dan pembangunan yang diorientasikan pada peningkatan ekonomi dan kemajuan teknologi telah mengancam masa depan planet Bumi ini. Kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dengan skala ekstensif menuntut masyarakat global untuk bersatu padu menghadapinya dengan beragam cara dan disiplin pengetahuan yang berbeda-beda.

Philip Shabecoff, sebagaimana dikutip Mudhofir Abdullah (2010:2), mengemukakan bahwa sejak abad ke-19 akar-akar gerakan *environmentalism modern* telah muncul, namun gerakan tersebut berkembang secara masif pada abad ke-20. Pada 1960-an, beberapa ahli ekonomi mulai mengkaji dampak pertumbuhan ekonomi atas lingkungan, salah satunya Kenneth Boulding, seorang ahli ekonomi Amerika Serikat (AS).

Pada 1960-an juga ditandai dengan kesadaran sekelompok teolog Kristen, ilmuwan, dan pemimpin gereja untuk membentuk kelompok studi Iman-Manusia-Alam di bawah payung National Council of Churches. Menjelang 1970-an, sebuah gerakan eko-keadilan yang berupaya mengintegrasikan ekologi, keadilan, dan iman Kristen mulai mengungkap pemikiran mereka dalam beberapa telaah teologis, etis, histo-

ris, biblikal, dan kebijakan umum yang berlangsung di Amerika Utara (Charpman, 2007:32).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pertama kali menyelenggarakan konferensi internasional tentang lingkungan pada 1972 di Stockholm, Swedia. Sejak saat itu, keterlibatan agama-agama besar dalam masalah konservasi lingkungan semakin intens dan mendapat perhatian khusus. Agama-agama besar ditempatkan sebagai pilar penting dalam menopang kesadaran konservasi lingkungan.

Menurut Mudhofir Abdullah, ajaran-ajaran agama dan spiritual dianggap mampu memperkuat kesadaran umat manusia untuk mengimplementasikan tugas-tugas konservasi lingkungan yang mengalami degradasi akibat agresi manusia-manusia modern secara terus-menerus melalui watak penaklukannya. Peran serta pemuka agama sangat penting sebagai upaya penanggulangan krisis lingkungan dalam jangka panjang. Seyyed Mohsen Miri (2007:24-25) membagi dua pendekatan sebagai solusi untuk mengatasi krisis lingkungan, baik secara individual maupun sosial. Pertama, pemecahan krisis melalui pertimbangan atas segala sesuatu yang terlihat langsung, membuat perubahan jangka pendek, dan membuat suatu perencanaan ulang. Kedua, pemecahan krisis melalui penjabaran sebab dan faktor yang mendorong munculnya krisis (aspek ontologis), melalui dasar keilmuan (aspek epistemologis), kerangka rohani, dan intelektual, serta paradigma budaya yang menyebabkan krisis tersebut terjadi dengan mengacu kepada pendekatan pertama.

Bagi Seyyed Mohsen Miri, pendekatan kedua dinilai lebih tepat

karena mampu memberikan pengaruh lebih nyata. Menurutny, jika hanya berpegang pada pendekatan pertama, maka masalah akan muncul kembali dan menjadi lebih serius karena krisis sebelumnya masih aktif. Meskipun beberapa percobaan penting telah dilakukan, semisal proyek penggantian kelengkapan transportasi, membuat bahan bakar nonfosil, merancang teknologi ramah lingkungan, pendekatan pertama tidaklah dapat menghapus krisis lingkungan dan tidak dapat menjadi solusi yang memadai bagi masalah tersebut.

Krisis lingkungan memang butuh penyelesaian yang bersifat jangka panjang karena krisis ini tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan sosial-ekonomi dan kependudukan semata. Krisis lingkungan adalah persoalan ultimasi, persoalan cara pandang manusia terhadap alam semesta. Tak ada yang tidak sepatat bahwa problem lingkungan saat ini terjadi karena perilaku manusia yang mengubah ekosistem bumi menjadi terancam keambangannya.

### Solusi

Pada titik inilah peran agama untuk menjawab problem lingkungan yang krusial menjadi sangat dibutuhkan. Menurut Seyyed Hossein Nasr (2005), nilai-nilai agama dan kearifan-kearifan moral sangat diperlukan untuk merawat keseimbangan alam dari situasi *chaos*. Tanpa adanya penguatan terlebih dahulu basis keyakinan dan spiritual manusia, serta memurnikan dirinya dari intervensi sifat dan sikap arogansi, pragmatisme, rakus dan sifat nafsu lainnya, maka semua upaya yang dilakukannya untuk melindungi alam dari kerusakan tak lebih dari se-

Pemimpin Redaksi: Nashihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha.

Redaktur Pelaksana: Eiba Damhuri. Kepala Newsroom: M Irwan Arielyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Redaktur Senior: Anif Punto Utomo. Wakil Redaktur Pelaksana: Ifran Jumaldi, Syahrudin El-Fiki, Kumara Dewastara. Asisten Redaktur Pelaksana: Niduramanta, Joko Sedewo, Nur Hasan Murtiati, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Alichah, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agus Yulianto, Ali Shahab, Asep K. Nurzaman, Andi Saubani, Anjar Fahmiarto, A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan, Budi Rahajo, Burhanuddin Billa, Citra Listya Rini, Damanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyossa, Darmawan, Desy Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwanto, Djoko Sueno, Dyah Ratna Meta Novia, Edi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Eko Widayanto, Endro Yuwanto, Erdy Nasrul, Esthi Maharani, EH Ismail, Ferman Rahadi, Ferry Kisilhandi, Firkah Fansuri, Fitri Andayani, Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emerald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, Johar Arief, Khorul Azwar, Lilis Sri Handayani, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Hafri, M Ihsan Shidiqey, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridwanini, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restu Luffdiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reiny Dwiananda, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Sekti Oktaniasia, Setyanavinda Livikansera, Suli Tri Puji Budiwati, Stevy Maradona, Susie Evidia Vuidianti, Taufiqurrahman Bachdadi, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wawan Tunjung Palupi, Yeyen Restiyani, Yoebel Ganessa Rasyid, Yogi Andri Cahyadi, Yulianingsih, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah.

Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Hadi Supctio. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Sudiaman. Pjs Kepala Perwakilan DIY - Jateng & Jatim : Hariyadi B.Susanto. Nian Pololan (Medan), Maspril Arles (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Sekretaris Redaksi: Fakhru Razi.

Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting). Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax Redaksi: 021-798.3623. E-mail: sekretariat@republikamedia.com. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Tel: 021-794.4693. Fax: 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441. Fax: 021-791.98442. Online: Fax: 022-7271384. Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028. Fax: 0274-541.582. Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51. Tel: 031-501.7409. Fax: 031-504.5072.

Direktur Utama: Erick Thohir.

Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengking. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri. Direktur Operasional: Tommy Tamtomo. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Marketing dan Sales: Yulianingsih. Manajer Iklan: Indra Wisnu Wardhana. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Darikman Ruminta. Manajer Keuangan: Hery Setiawan.

Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim). Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri: Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Baru, No. Rek. 375.305.666.8. Fax: 022-7271384. Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028. Fax: 0274-541.582. Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2002.

HARIAN  
**REPUBLICA**

MAHAKA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik *Harian Republika*. Semua wartawan *Harian Republika* dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/opini yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.